

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Terdapat banyak definisi atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para pakar, yang keseluruhan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang pajak, diantaranya seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 tentang perpajakan adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2008:1)

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksa) dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Menurut Herry Purwono (2010:6)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Richard Burton (2009:22)

Pajak adalah harta karyawan (swata) yang berdasarkan Undang-Undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan pinalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Adapun pengertian menurut S. Meliala & Francisca W. Oetomo (2012:5)

Pajak adalah iuran kepada Negara (dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan baik mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut adalah Negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi dari keduanya selama satu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan. (Donald E Kieso, 2009: 453)

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas yang lain merupakan operasi pokok yang berkelanjutan dari satu kesatuan tersebut. (Soemito, 2004: 10)

Pendapatan suatu perusahaan diperoleh sepanjang tahap siklus operasi yaitu saat pesanan, produksi, penjualan, dan penghasilan. Seperti dalam perusahaan jasa proses penciptaannya dimulai dari pembuatan persetujuan pemberian jasa sampai terjadinya proses penagihan atas balas jasa. (Sukrisno, 2012: 28)

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Kesit (2008: 3) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau kegiatan di Indonesia. Sedangkan menurut Azhari (2008:31) pajak

penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Ketentuan material pajak penghasilan sebagai besar dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, perubahan pertama menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang pajak penghasilan, perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, perubahan ketiga menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dan perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

2.4 Deductible Expense dan Non Deductible Expense

Deductible expense merupakan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh, baik PPh orang pribadi maupun PPh badan. Sedangkan *non deductible expense* merupakan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh, baik PPh orang Pribadi maupun PPh badan. (SE Dirjen Pajak No. 27 Tahun 1986). Adapun yang termasuk *deductible expense* dan *non deductible expense* terlihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1

Daftar *deductible expense* dan *non deductible expense*

Deductible Expense (biaya yang dapat dikurangkan)	Non Deductible Expense (biaya yang tidak dapat dikurangkan)
<p>1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya bahan baku • Upah / gaji • Bunga • Sewa • Royalti • Transportasi • Biaya administrasi • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Pajak kecuali PPh <p>2. Kerugian selisih kurs</p> <p>3. Biaya penelitian</p> <p>4. Biaya beasiswa dan pelatihan</p> <p>5. Piutang tak tertagih</p> <p>6. Pemupukan dana cadangan untuk bank, asuransi dan biaya reklamasi</p>	<p>1. Biaya yang tidak memiliki daftar nominatif dan tidak dapat dibuktikan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Entertainment • Biaya Reparasi • Biaya Jamuan • Biaya kepentingan pribadi <p>2. Pembayaran deviden koperasi</p> <p>3. Pemupukan dana cadangan</p> <p>4. Natura</p> <p>5. Sumbangan</p> <p>6. PPh</p> <p>7. Sanksi administrasi dan sanksi pajak</p> <p>8. Premi asuransi yang dibayar sendiri</p>

Sumber : SE Dirjen pajak No. 27 Tahun 1986

2.5 Biaya Entertainment

Biaya entertainment sering juga disebut dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1).

Biaya entertainment menurut penjelasan SE-27/PJ.22/1986 adalah yang diberikan dalam bentuk penjamuan seperti jamuan makan di restoran, penginapan di hotel, dan serta olah raga berkelas yang bukan diberikan kepada pegawai dan diberikan bukan sebagai pengganti imbalan jasa (*barter*) untuk relasi bisnis.

Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen pajak No. 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan serta wajib pajak harus melampirkan daftar nominatif pada SPT tahunan. Bentuk daftar nominatif bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Daftar Nominatif Biaya Entertainment

No	Pemberian Entertainment dan Sejenisnya					Relasi Usaha yang Diberikan Entertainment dan Sejenisnya				Ket
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Sumber : SE Dirjen pajak No. 27 Tahun 1986

Jurnal pada saat pembayaran biaya entertainment dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jurnal pada saat pembayaran biaya entertainment

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Biaya entertainment	Rp xxx	
	Kas		Rp xxx

Sumber : Harnanto (2008)

2.6 Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan menurut Brotodihardjo (2010) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, tetapi hanya untuk sebagian tertentu saja. Biaya sumbangan tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan

kena pajak, pernyataan ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g, yang berbunyi: Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang dalam pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Contoh biaya sumbangan adalah seperti pembinaan olahraga, iuran RT/RW, pembangunan infrastruktur sosial seperti panti asuhan, rumah jompo dan tempat ibadah. Jurnal pada saat pembayaran biaya sumbangan terlihat pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4

Jurnal pembayaran biaya sumbangan

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Biaya sumbangan	Rp xxx	
	Kas		Rp xxx

Sumber: Harnanto (2008)

2.7 Biaya Natura

Biaya natura menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf d, bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang seperti beras, gula, dan dalam bentuk kenikmatan berupa penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak.

Biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, yang berbunyi: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Jurnal pada saat pembayaran biaya natura terlihat pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5

Jurnal pembayaran biaya natura

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Biaya natura	Rp xxx	
	Kas		Rp xxx

Sumber: Harnanto (2008)

2.8 Tarif Pajak Penghasilan

a. Tarif Efektif PPh Badan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan menggunakan tiga lapisan tarif, maka Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dalam pasal

17 ayat (1) huruf b dan pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Daftar perubahannya dapat dilihat pada Tabel 2.6 :

Tabel 2.6

Daftar perubahan tarif PPh

Tarif Undang-Undang No. 17 Tahun 2000		Tarif Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	
Lapisan PKP	Tarif	Lapisan PKP	Tarif
s.d Rp 50 Juta	10%	Berapapun nilai PKP	28% (2009)
Di atas Rp50 Juta s.d Rp 100 Juta	15%		25% (2010 dst)
Di atas Rp 100 Juta	30%		

Sumber : Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008

b. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*). Undang-Undang pajak penghasilan menganut pendekatan tarif berbeda antara tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan tarif pajak untuk badan.

PPh terutang dari suatu wajib pajak dalam suatu tahun pajak untuk wajib pajak dalam Negeri (badan dan orang pribadi) dan wajib pajak luar Negeri yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap

(BUT) di Indonesia dihitung dengan menerapkan tarif utama pajak dikalikan terhadap penghasilan kena pajak. Tarif umum pajak menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Bagi wajib pajak orang pribadi dalam Negeri lapisannya terlihat pada

Tabel 2.7:

Tabel 2.7

Tarif Pajak

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pibadi, disamping biaya yang diperkenankan menurut pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi pula dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Contoh :

Perhitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Misalkan jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.219.160.000,00 maka jumlah pajak terutang dihitung sebagai berikut :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 169.160.000,00 = \text{Rp } 25.374.000,00$$

$$\text{Total PPh Terutang} = \text{Rp } 27.874.000,00$$

Jadi, jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri adalah sebesar Rp 27.874.000,00.

- 2) Bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Contoh : Penghitungan pajak terutang untuk wajib pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Misalkan jumlah kena pajak sebesar Rp.250.000.000,00 maka jumlah pajak terutang dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rp. } 250.000.000,00 \times 25\% = \text{Rp. } 62.500.000,00$$

Jadi, jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak badan adalah sebesar Rp. 62.500.000,00.

2.9 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Definisi subjek pajak penghasilan adalah orang prubadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. (Sukrisno, 2012:49).

- a. Subjek pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- 2) Badan yang merupakan sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - 3) Bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- b. Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak luar Negeri.
- 1) Subjek pajak dalam Negeri adalah:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat, berkedudukan di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar Negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c) Yang dimaksud badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - i. Tempat kedudukan manajemen
 - ii. Cabang perusahaan
 - iii. Kantor perwakilan

- iv. Gedung kantor
- v. Pabrik
- vi. Bengkel
- vii. Pertambangan dan penggalan sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan.
- viii. Perikanan, peternakan, pertanian perkebunan dan kehutanan.
- ix. Pemberian kerja dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- x. Proyek konstruksi, instalasi, dan proyek perakitan.
- xi. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukan tidak bebas.
- xii. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

c. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah :

- 1) Badan perwakilan Negara asing.
- 2) Penjabat-penjabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau penjabat-penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :

- a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- c) Penjabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk :
 - a) Antara pihak-pihak yang bersangkutan, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan alihan usaha.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan.
 - e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang.
 - g) Deviden yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki dalam periode tertentu.

- h) Royalti yaitu suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan hutang.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n) Premi asuransi yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

e. Penghasilan yang Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu. Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut definisi Undang-Undang pajak penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan.

- 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 6) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a) Deviden dari cadangan laba yang ditahan

- b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
 - c) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - d) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 7) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma dan Kongsi.
- 8) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian izin usaha.
- 9) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
- a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Pengecualian beberapa jenis penghasilan sebagai objek pajak ini bertujuan:

- a) Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut.
- b) Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

2.10 Biaya-Biaya Yang Diperkenankan Dan Yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan Dalam Undang-Undang Perpajakan

- a. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan dalam Undang-undang perpajakan

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh antara lain :

1) Biaya-biaya 3M

Biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya perkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

2) Penyusutan dan amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3) Iuran kepada dana pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan boleh dibebankan sebagai biaya sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh menteri keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4) Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta

Kerugian karna penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto.

5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijakan pemerintah dibidang moneter dapat dibebankan sebagai biaya. Pembebanan selisih kurs tersebut dapat dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas.

6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- b) Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan dalam negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- d) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak.

9) Biaya berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu

Beberapa aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan, maupun penyusutan diperlukan secara khusus, antara lain kepemilikan:

- a) Biaya telepon seluler
- b) Biaya kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya
- c) Biaya kendaraan sedan atau sejenisnya

10) Biaya entertainment dan sejenisnya

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga dibuat dengan biaya reparasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut dengan SE Dirjen pajak No. 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.

11) Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Adapun biaya sumbangan yang boleh dikurang dari penghasilan bruto antara lain:

- a) Biaya beasiswa dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
- b) Bantuan kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darusalam dan Sumatra Utara.

b. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan dalam Undang-undang perpajakan

Adapun biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, antara lain :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 8) Pajak penghasilan
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

2.11 Akuntansi Pajak

a. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atau penghasilan yang diterima

atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Di asumsikan PT. XYZ bulan Januari 2010 membayar gaji dan upah dapat dilihat pada Tabel 2.8:

Tabel 2.8

Perhitungan PPh pasal 21

Penghasilan bruto		Rp. 200.000.000,-
Iuran pensiun	Rp. 8.000.000,-	
Iuran jaminan hari tua	Rp. 1.000.000,-	
PTKP K/2	<u>Rp.19.800.000,-</u>	
		<u>Rp. 28.800.000,-</u>
PKP		Rp. 171.200.000,-
PPh 21 setahun		
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 121.200.000,-	=	<u>Rp. 18.180.000,-</u>
PPh 21 sebulan		Rp. 20.680.000,-/12 = Rp. 1.723.333

Sumber: Harnanto (2008)

Berdasarkan asumsi diatas pencatatan yang dilakukan oleh PT.

XYZ adalah sebagai berikut :

1) Jurnal pada saat pembayaran gaji

Tabel 2.9

Jurnal pembayaran gaji

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Biaya gaji	Rp. 200.000.000,-	
	Utang PPh 21		Rp. 20.680.000,-
	Kas		Rp. 179.320.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

2) Jurnal terhadap pembayaran pajak ke kas negara

Tabel 2.10

Jurnal pembayaran PPh pasal 21

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Utang PPh 21	Rp. 20.680.000,-	
	Kas		Rp. 20.680.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

b. Pajak penghasilan pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.03/2009 Tanggal 3 Maret 2009. Dengan pemberlakuan ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009. Sebagai upaya mengurangi dampak krisis global pemerintah menetapkan untuk memberikan stimulus fiskal berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu.

Ketentuan tersebut telah diikuti dengan Peraturan Direktur Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu. Untuk memudahkan dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu di asumsikan sebagai berikut :

Tn. Dedy yaitu pegawai tetap dari PT. Mayapada sebagai perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industry pertenunan dengan

Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009, Tn.Dedy memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.25.000,00. Tn. Dedy menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang :

Penghasilan bruto sebulan	Rp 5.000.000,00
---------------------------	-----------------

Pengurang

Biaya jabatan

(5% x Rp 5.000.000,00)	Rp 250.000,00
------------------------	---------------

Iuran pensiun	<u>Rp 25.000,00</u>
---------------	---------------------

	<u>Rp 275.000,00</u>
--	----------------------

Penghasilan netto sebulan	Rp 4.725.000,00
---------------------------	-----------------

Penghasilan netto setahun:

12 x Rp 4.725.000,00	Rp 56.700.000,00
----------------------	------------------

PTKP setahun:

Untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00
------------------	------------------

Untuk WP kawin	Rp 1.320.000,00
----------------	-----------------

Tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000,00</u>
-----------------------------	------------------------

	<u>Rp 19.800.000,00</u>
--	-------------------------

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 36.900.000,00
--------------------------------	------------------

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp 36.900.000,00	Rp 1.845.000,00
-----------------------	-----------------

PPh Pasal 21 terutang sebulan:

1/12 x Rp 1.845.000,00	Rp 153.750,00
------------------------	---------------

Besarnya penghasilan yang diterima Tn. Dedy apabila PPh pasal 21 tidak Ditanggung Pemerintah:

Penghasilan bruto sebulan	Rp 5.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun	(Rp 25.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutang	<u>(Rp 153.750,00)</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 4.821.250,00

Besarnya penghasilan yang diterima TN. Dedy apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21

tidak ditanggung Pemerintah	Rp 4.821.250,00
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung	
Pemerintah	Rp 153.750,00
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 4.975.000,00

c. Pajak penghasilan pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan dibidang lainnya. Contoh :

Pemerintah Provinsi Riau membeli dari Pemda penjual alat tulis kantor PT. ABC di Pekanbaru senilai Rp. 200.000.000,- tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PT. ABC pada saat pencatatan dapat dilihat pada Tabel 2.11:

Tabel 2.11

Jurnal PPh pasal 22

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Kas	Rp. 197.000.000,-	
	PPh 22 dibayar dimuka	Rp. 3.000.000,-	
	Penjualan		Rp. 200.000.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

d. Pajak penghasilan pasal 23

Ketentuan dalam PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya.

Diasumsikan pada PT. XYZ membayar bunga kepada PT. ABC sebesar Rp. 45.000.000,- pencatatan yang dilakukan PT. XYZ adalah sebagai berikut:

1) Jurnal pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15%

Tabel 2.12

Jurnal pemotongan PPh pasal 23

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Biaya bunga	Rp. 45.000.000,-	
	Utang PPh pasal 23		Rp. 6.750.000,-
	Kas		Rp. 38.250.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

2) Jurnal pembayaran ke kas Negara

Tabel 2.13

Jurnal pembayaran PPh pasal 23

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Utang PPh pasal 23	Rp. 6.750.000,-	
	Kas		Rp. 6.750.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

e. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.3/2002 tentang Kredit Pajak Luar

Negeri yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2002. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan mulai awal tahun 2009.

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dengan dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Contoh :

PT. Amanda di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2011 memperoleh keuntungan sebesar US\$ 100.000,00. Pajak Penghasilan yang berlaku di Negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut.

Keuntungan Z Inc.	US\$ 100.000,00
Pajak Penghasilan atas Z Inc. (48%)	(<u>US\$ 48.000,00</u>)
	US\$ 52.000,00
Pajak atas dividen (38%)	(<u>US\$ 19.760,00</u>)
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32.240,00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. Amanda adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$ 19.760,00. Pajak Penghasilan (*Corporate Income Tax*) atas Z Inc. sebesar US\$ 48.000,00

tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. Amanda, karena pajak sebesar US\$ 48.000,00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Amanda di luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di Negara x. Sedangkan yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

f. Pajak penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Sebagai pembayaran dimuka atau angsuran, PPh pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Pada akhir tahun pajak, angsuran PPh pasal 25 dapat dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya wajib pajak diharuskan untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang pajak penghasilan, tujuan angsuran tersebut adalah agar wajib pajak tidak terlalu besar terutang penghasilan pada akhir tahun pajak.

Diasumsikan PT. XYZ membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp. 25.000.000,- ke kas Negara. Jurnal pencatatan pembayaran terlihat pada Tabel 2.14 :

Tabel 2.14

Jurnal pembayaran PPh pasal 25

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	PPh 25 dibayar dimuka Kas	Rp. 25.000.000,-	 Rp. 25.000.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

g. Pajak penghasilan pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar Negeri.

Diasumsikan PT. XYZ membayar royalti kepada CCM Corp sebesar Rp. 50.000.000,-. PT. XYZ akan memotong PPh pasal 26 sebesar $20\% \times \text{Rp. 50.000.000,-} = \text{Rp. 10.000.000,-}$. Sehingga jumlah yang akan dibayar adalah Rp. 40.000.000,-.

- 1) Jurnal bukti pemotongan PPh pasal 26 atas pemotongan pajak tersebut yang dibuat oleh PT. XYZ

Tabel 2.15

Jurnal pemotongan PPh pasal 26

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Biaya royalti PPh pasal 26 Kas	Rp. 50.000.000,-	 Rp. 10.000.000,- Rp. 40.000.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

2) Jurnal pembayaran ke kas Negara

Tabel 2.16

Jurnal pembayaran PPh pasal 26

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	PPh pasal 26	Rp. 10.000.000,-	
	Kas		Rp. 10.000.000,-

Sumber: Harnanto (2008)

h. Pajak penghasilan pasal 29

Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai akibat PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

1) Jurnal pengakuan PPh diakhir tahun

Tabel 2.17

Jurnal pengakuan PPh pasal 29

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	PPh terutang	Rp. xxx	
	Uang muka PPh		Rp. xxx
	Hutang PPh pasal 29		Rp. xxx

Sumber: Harnanto (2008)

2) Jurnal pembayaran ke kas Negara

Tabel 2.18

Jurnal pembayaran PPh pasal 29

No	Perkiraan	Debet	Kredit
1	Hutang PPh pasal 29	Rp. xxx	
	Kas		Rp. xxx

Sumber: Harnanto (2008)

2.12 Pajak Dalam Islam

a. Definisi pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-usyra* atau *Al-maks* atau juga bisa disebut *Adh-dharibah* yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut *Al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Pajak secara harifah tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah :

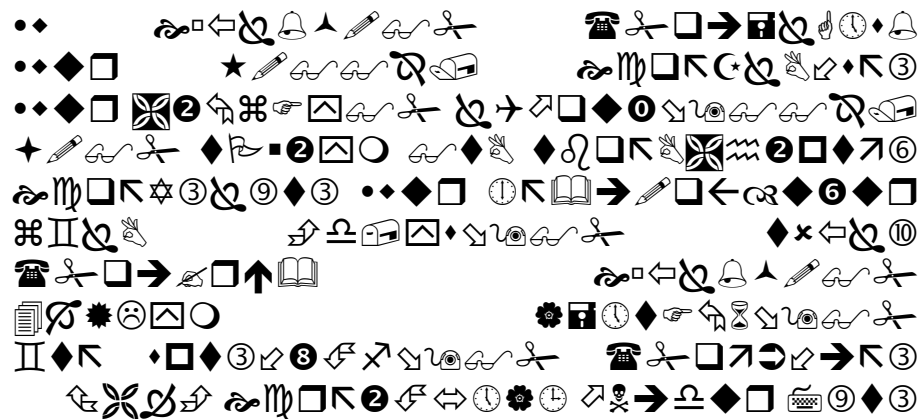
1) Pajak dengan konsep upeti (*udhiyah*) atau persembahan kepada raja.

Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja atau elit penguasa.

2) Pajak dengan konsep kontrak prestasi (*jizyah*) antara rakyat pembayar

pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.

- 3) Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.
- 4) Dalam tafsir Al-Manar karangan Muhammad Rasyid Ridaha mengatakan bahwa pajak baru dikenal pada abad IX Hijriah, pada Nabi Muhammad SAW pajak baru diwajibkan kepada orang-orang kafir Dzimnya dan Harby. Yang dilatar belakangi surat At-taubah (9:29) yaitu:



Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah

dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah : 29)

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

b. Perbedaan pajak dengan zakat

Imam Abu ja'far at-thahawi rahimahumullah dalam kitabnya *Syarh Ma'ani Al-attsar* (2/30-31), berkata bahwa *Al-usyra* yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasanya dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan: “hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat”.

Perbedaan lain yang sangat jelas antara pajak dengan zakat, diantaranya yaitu:

- 1) Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali oleh penguasa di suatu tempat.
- 2) Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal ini karena zakat berfungsi untuk mensucikan harta pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir, karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal ditanah kekuasaan kaum muslimin.
- 3) Yang dihapus oleh Rasulullah SAW tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat

termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam atau pemimpin dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak.

- 4) Zakat adalah salah satu bentuk syari'at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan Sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya dipungut oleh para raja Arab.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak yang dapat dilihat pada Tabel 2.19

Tabel 2.19

Persamaan dan perbedaan Pajak dengan Zakat

Uraian	Pajak	Zakat
Dasar Hukum	UU yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist	UU yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist
Subjek	Pribadi muslim	Pribadi muslim
Objek	Kelebihan penghasilan, konsumsi barang bukan kebutuhan pokok	Harta tertentu yang melebihi nishab
Sifat	Kewajiban keagamaan	Kewajiban keagamaan
Syarat ijab / kabul	Tidak disyaratkan	Disyaratkan
Masa berlaku kewajiban	Tidak sepanjang masa	Sepanjang masa
Jumlah terutang	Maksimum sesuai yang ditetapkan	Minimum sejumlah yang ditetapkan
Penggunaan dana	Pengeluaran Negara Selain Mustahik Zakat	Mustahiq tertentu
Imbalan	Tersedianya barang dan jasa untuk masyarakat	Pahala dari Allah SWT
Tarif	Ditetapkan berdasarkan ijtihad ulama	Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist
Penentuan penggunaan dana	Pemerintah berdasarkan syari'at	Allah SWT
Penerima manfaat	Semua golongan	Hanya asnaf delapan
Tujuan perolehan	Untuk kepentingan kemaslahatan umat yang	Untuk mencegah ketidakwajaran dan

	tidak terpenuhi dari Zakat	distribusi kekayaan
Saat terutang	Saat diperoleh	Setelah 1 tahun, kecuali Zakat pertanian
Fungsi	Solusi untuk kondisi darurat	Ujian keimanan atas harta

Sumber : Gusfahmi (2007)